

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 561/Ekonomi Pembangunan

Bidang Fokus : Bidang X

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DOSEN**



**ANALISIS PENENTUAN LOKASI OPTIMAL  
PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN BARU UNTUK MENGATASI  
KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI JAMBI**

**TIM PENGUSUL**

Ketua	: Ahmad Soleh, SE, ME	NIDN : 1015058502
Anggota	: Prima Audia Daniel, SE, ME	NIDK : 8852530017
	: Yunie Rahayu, SE, ME	NIDN : 1021067804
	: Muhammad Fhariza	NPM : 1810075602081

**Dibiayai Oleh :**

**Dipa Universitas Muhammadiyah Jambi Tahun Anggaran 2022/2023**


**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Penentuan Lokasi Optimal Pusat-Pusat  
Pertumbuhan Baru Untuk Mengatasi Ketimpangan  
Wilayah Di Provinsi Jambi
2. Peserta Program : Penelitian
3. Tim Penelitian
  - a. Ketua Tim Peneliti
    - a. Nama : Ahmad Soleh, SE, ME
    - b. NIDN : 1015058502
    - c. Jabatan Fungsional : Lektor
    - d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
    - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
    - f. Alamat Kantor/Telp/Email : [mas.soleh@yahoo.com](mailto:mas.soleh@yahoo.com)
  - b. Anggota Tim Peneliti Dosen
    - I. a. Nama : Prima Audia Daniel, SE, ME
    - b. NIDK : 8852530017
    - c. Jabatan Fungsional : Lektor
    - d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
    - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
    - f. Alamat Kantor/Telp/Email : [primaaudiadaniel@gmail.com](mailto:primaaudiadaniel@gmail.com)
    - II.a. Nama : Yunie Rahayu, SE, ME
    - b. NIDN : 1021067804
    - c. Jabatan Fungsional : Lektor
    - d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
    - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
    - f. Alamat Kantor/Telp/Email : [mas.soleh@yahoo.com](mailto:mas.soleh@yahoo.com)
  - II. Anggota Tim Peneliti Mahasiswa
    - a. Nama : Muhammad Fhariza
    - b. NPM : 1810075602225
    - c. Jabatan Fungsional : -
    - d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
    - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
    - f. Alamat Kantor/Telp/Email : [m.fhariza\\_123@gmail.com](mailto:m.fhariza_123@gmail.com)
4. Lokasi Kegiatan
  - a. Wilayah : Negara Indonesia
  - b. Provinsi : Jambi
5. Lama Penelitian : 3 Bulan
6. Biaya Total Penelitian : Rp. 1.500.000
  - Dana Perguruan Tinggi : Rp. 1.500.000,00
  - Dana Institusi Lain : Rp. 0,00

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


  
**Hasan Basri, SE, M.Si**  
NIDN: 1015116801

Jambi, Desember 2022  
Peneliti,

  
**Ahmad Soleh, SE, ME**  
NIDN: 1015058502

Menyetujui,  
Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Jambi



  
**Prima Audia Daniel, SE, ME**  
NIDK.8852530017

## DAFTAR ISI

### Contents

DAFTAR ISI .....	2
RINGKASAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB I. PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Perumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	7
2.2 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi .....	10
2.3 Teori Pusat Pertumbuhan.....	11
2.4 Pusat Pengembangan Ekonomi .....	13
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....	15
3.1 Metode Penelitian.....	15
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	15
3.3 Metode Analisis Data.....	15
BAB IV. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN .....	17
4.1 Anggaran Biaya .....	28
4.2 Jadwal Penelitian.....	28
DAFTAR PUSTAKA .....	20

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan (Undang-Undang nomor 32 tahun 2004), sehingga pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu mandiri di dalam penyelenggaraan pemerintahan, menentukan kebijakan pembangunan serta pendanaan. Kondisi ini akan mampu meningkatkan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber potensi yang dimiliki daerah, sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat diusahakan seminimal mungkin. Kunci keberhasilan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah dimana kebijakan pembangunan daerah ditekankan pada kekhasan karakteristik daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Pembangunan ekonomi daerah juga harus mampu menumbuhkan semangat untuk memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pemberdayaan potensi ekonomi lokal dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh masing-masing daerah apabila dibiarkan begitu saja akan menyebabkan terjadinya kesenjangan kemakmuran antar daerah maupun antar kawasan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan letak geografis, kondisi, situasi alamiah dan sebagainya, yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan daerah yang memiliki potensi melimpah semakin kaya, sedangkan daerah yang memiliki potensi terbatas menjadi semakin miskin, sehingga perlunya cara untuk memperkecil tingkat ketimpangan daerah. Kondisi yang semacam itu dialami oleh Provinsi Jambi yaitu terjadinya ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi, dan ketimpangan

itu dapat dilihat melalui Produk Domestik Bruto (PDRB) suatu daerah. PDRB Provinsi Jambi dapat terlihat di tabel 1

Tabel 1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010  
Kabupaten /Kota di Propinsi Jambi Tahun 2019- 2021 (milyar rupiah)

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	Total
Kerinci	6.326,54	6.570,81	6.844,24	19.741,59
Merangin	9.787,46	9.869,18	10.371,68	30.028,32
Sarolangun	10.717,75	10.690,79	11.397,73	32.806,27
Batang Hari	11.713,38	11.667,61	12.221,19	35.602,18
Muaro Jambi	16.126,72	16.186,86	16.847,01	49.160,59
Tanjab Timur	17.967,59	17.262,51	17.284,93	52.515,03
Tanjab Barat	30.744,99	30.559,42	30.976,20	92.280,61
Tebo	10.160,98	10.158,89	10.597,49	30.917,36
Bungo	12.549,93	12.494,42	13.133,52	25.683,45
Kota Jambi	19.550,81	18.775,82	19.515,49	57.842,12
Sungai Penuh	4.607,81	4.600,23	4.768,84	13.976,88

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir, PDRB tertinggi diraih oleh kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu sebesar total Rp 92,280,61 milyar sementara PDRB terendah terjadi di kabupaten sungai penuh dengan total sebesar Rp 13.976,88 milyar. Sementara jika dilihat lebih lanjut pada daerah tetangga para penghasil PDRB terbesar dan terkecil yaitu kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu total sebesar Rp 52.515,03 milyar, hampir setengah dari PDRB kabupaten Tanjung Kabung Barat selama 3 tahun. Dan jika dilihat urutan penyumbang PDRB terbesar, nomor 3 setelah kota Jambi. Selanjutnya untuk kabupaten kerinci, PDRB selama 3 tahun terakhir yaitu sebesar Rp 19.741,49milyar dan jika dilihat urutan penyumbang terkecil terhadap PDRB Provinsi Jambi menempati urutan ke 2 setelah Sungai Penuh. Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata PDRB yang ada di Propinsi Jambi tidak bisa mewakili kondisi riil yang ada di lapangan, keadaan itu juga menjadi perhatian yang khusus

dari pemerintah Propinsi Jambi dan pihak-pihak yang terkait untuk mencari solusi yang tepat.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk mempersempit kesenjangan antardaerah adalah diterapkannya kebijakan pembangunan daerah melalui konsep kawasan andalan, yang berdasarkan potensi yang dimiliki daerah. Melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat terjadi keseimbangan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita antarwilayah, sehingga dapat menutup atau minimal mempersempit gap antara perkembangan ekonomi daerah.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana posisi struktur perekonomian masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Jambi, sektor-sektor ekonomi unggulan apa saja yang berpotensi untuk dikembangkan di masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Jambi, dan bagaimana interaksi ekonomi di masing-masing kabupaten/kota Di Propinsi Jambi.

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam bahasa Inggris disebut Gross Domestic Product, merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan, di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto/Gross Domestic Regional Product) PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, sebagai contoh perhitungan PDB dan PBRB di Indonesia menggunakan tahun dasarnya yaitu tahun 2010.

Penentuan PDRB atas harga konstan, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). dimana Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan. Perhitungan PDB maupun PDRB secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

1. Pendekatan Produksi: Perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi merupakan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB menurut lapangan usaha dikelompokkan dalam 9 sektor ekonomi sesuai dengan International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) 1) Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, meliputi: a. Subsektor Tanaman bahan makanan b. Subsektor Tanaman perkebunan c. Subsektor Peternakan d. Subsektor Kehutanan e. Subsektor Perikanan. 2) Sektor Pertambangan dan Penggalian, meliputi: a. Subsektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, b. Subsektor Pertambangan Bukan Migas c. Subsektor Penggalian. 3) Sektor Industri Pengolahan, meliputi: a. Subsektor Industri Migas - Pengilangan Minyak Bumi- Gas Alam Cair (LNG), b. Subsektor Industri Bukan Migas - Makanan, Minuman dan Tembakau - Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki - Barang Kayu dan Produk Lainnya - Produk Kertas dan Percetakan - Produk Pupuk, Kimia dan Karet - Produk Semen dan Penggalian Bukan Logam, - Logam Dasar Besi dan Baja, - Peralatan, Mesin dan Perlengkapan Transportasi - Produk Industri Pengolahan Lainnya, 4) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, meliputi, a. Subsektor Listrik, b. Subsektor Gas, c. Subsektor Air Bersih,



5) Sektor Konstruksi, mencakup konstruksi bangunan, jalan, jembatan dan sejenisnya. 6) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, meliputi a. Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, b. Subsektor Hotel, c. Subsektor Restoran 7) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi. meliputi; Subsektor Pengangkutan Angkutan Rel- Angkutan Jalan Raya - Angkutan Laut - Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan - Angkutan Udara - Jasa Penunjang Angkutan b. Subsektor Komunikasi 8) Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan, meliputi: a. Subsektor Bank b. Subsektor Lembaga Keuangan Tanpa Bank, c. Subsektor Jasa Penunjang Keuangan d. Subsektor Real Estate, e. Subsektor Jasa Perusahaan. 9) Jasa-Jasa, meliputi: a. Subsektor Pemerintahan Umum, - Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, - Jasa Pemerintahan Lainnya b. Subsektor Swasta - Jasa Sosial Kemasyarakatan - Jasa Hiburan dan Rekreasi - Jasa Perorangan dan Rumah Tangga

2. Pendekatan Pengeluaran: Perhitungan PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran/penggunaan dikelompokkan dalam 6 komponen yaitu: 1). Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang, dan jasa dikurangi dengan penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan rumah tangga selama setahun. 2). Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang, baik pemerintah pusat dan daerah, tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Data yang dipakai adalah realisasi APBD. 3). Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal bekas atau baru dari luar negeri. Metode yang dipakai adalah pendekatan arus barang. 4). Perubahan Inventori. Perubahan stok dihitung dari PDRB hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral dikurangi komponen permintaan akhir lainnya. 5). Ekspor Barang dan Jasa. Ekspor barang dinilai menurut harga free on board (fob) 6). Impor Barang dan Jasa. Impor barang dinilai menurut cost insurance freight (cif).

3. Pendekatan Pendapatan: Perhitungan PDRB dengan pendekatan pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung netto (pajak tak langsung dikurangi subsidi) Produk Nasional Bruto (PNB) adalah PDB ditambah dengan pendapatan netto dari luar negeri. Pendapatan netto luar negeri adalah pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia. Pendapatan Nasional adalah PNB dikurangi dengan pajak tidak langsung (neto) dan penyusutan. Pajak tidak langsung netto adalah pajak tidak langsung dikurangi dengan subsidi pemerintah. Indeks implisit PDB merupakan rasio antara PDB harga Berlaku dengan PDB harga konstan. Deflator PDB adalah laju pertumbuhan indeks implisit PDB. Ekspor barang dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk Indonesia dengan penduduk negara lain.

## **2.2 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi**

Karl seidman mengartikan pembangunan ekonomi adalah sebuah proses menciptakan serta memanfaatkan aset fisik, keuangan, manusia, erta sosial untuk dapat menghasilkan kesejahteraan ekonomi serta kualitas hidup yang lebih baik juga dibagi lagi secara luas untuk para suatu komunitas maupun wilayah. Dengan demikian, pembangunan ekonomi harus dilihat sebagai proses multidimensional yang meliputi perubahan pada berbagai aspek, termasuk di dalamnya infrastruktur sosial, sikap masyarakat, serta institusi nasional tanpa mengesampingkan tujuan awal yaitu pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja. (Suryana, 2000). Berbeda dengan pembangunan ekonomi yang mencakup arti luas, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu

proses yang mengakibatkan pendapatan per kapita meningkat dalam jangka panjang tanpa memperhitungkan pertambahan penduduk, perubahan struktur ekonomi maupun modernisasi. Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdayasumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi (pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut) (Lincoln Arsyad, 1999). Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi

### **2.3 Teori Pusat Pertumbuhan**

Analisis mengenai pusat pertumbuhan merupakan suatu analisis yang cukup populer dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah karena bisa mengsinkronkan aspek pertumbuhan dan pemerataan pembangunan antar wilayah yang kadangkala bersebrangan antara satu dengan lainnya. Dengan konsep ini diharapkan sasaran pembangunan lebih mudah tercapai. Perroux (1955) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada daerah tertentu yang didorong oleh adanya keuntungan aglomerasi yang timbul karena adanya konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut.

Munculnya beberapa konsentrasi kegiatan ekonomi ini selanjutnya mendorong pula peningkatan efisiensi kegiatan ekonomi yang berdampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional/regional (safrizal, 2008) Selanjutnya Hirschman (1958) mengatakan bahwa ada daerah tertentu yang tumbuh dengan cepat (growing point) dan adapula yang bertumbuh sangat lambat (lagging region). Hal ini terjadi karena dalam proses pembangunan terdapat efek rembesan (trickling down effect) dan efek konsentrasi (polarization effect) yang berbeda antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Karenanya untuk mencapai tingkat

pendapatan yang tinggi, terdapat keharusan untuk membangun sebuah atau beberapa buah pusat kekuatan ekonomi dalam wilayah suatu negara atau yang disebut sebagai pusat-pusat pertumbuhan (growth pole) (adisasmita, 2005) Pusat Pertumbuhan dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional Pusat Pertumbuhan adalah suatu konsentrasi kelompok usaha atau cabang industry yang karena sifat hubungannya memiliki unsureunsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik kedalam maupun keluar. Sedangkan secara geografis pusat pertumbuhan merupakan suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (pole of attraction) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi disitu dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada dikota tersebut (tarigan, 2004) Sedangkan Richardson (1977) mendefinisikan Pusat Pertumbuhan sebagai berikut :” A growth pole was defined as a set of industries capable of generating dynamic growth in the ekonomi and strongly interrelated to each other via input-output linkages around a leading industry(propulsive industry) (sjafrizal, 2008).

Dari pengertian diatas terlihat bahwa ada 4 ciri utama dari suatu pusat pertumbuhan,yaitu antara lain : (1) terdapat sekelompok aktivitas ekonomi yang terkonsentrasi pada suatu lokasi; (2) konsentrasi tersebut dapat mendorong kegiatan ekonomi yang dinamis dalam perekonomian; (3) terdapaat keterkaitan input dan output antara sesama kegiatan ekonomi pada pusat pertumbuhan tersebut, dan (4) terdapat sebuah industry induk yang mendorong pengembangan kegiatan ekonomi dalam pusat pertumbuhan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi tidak dapat terjadi secara serentak pada semua tempat dan semua sektor perekonomian, tetapi hanya pada titik-titik tertentu dan pada sektor-sektor tertentu pula. Sebaiknya investasi diprioritaskan pada sektor-sektor utama yang berpotensi dan dapat meningkatkan pendapatan wilayah dalam jangka waktu relatif singkat (Glasson, 1990).

Pernyataan diatas dimaksudkan bahwa wilayah yang memiliki potensi berkembang lebih besar akan berkembang lebih pesat, kemudian pengembangan wilayah tersebut akan merangsang wilayah sekitarnya. Bagi sector yang memiliki

potensi berkembang lebih besar cenderung dikembangkan lebih awal yang kemudian diikuti oleh perkembangan sector lain yang kurang potensial. Karena sektor ini diharapkan dapat tumbuh dan berkembang pesat yang akan merangsang sektor-sektor lain yang terkait untuk berkembang mengimbangi perkembangan sektor potensial tersebut. Hal inilah yang memungkinkan pengembangan sektor potensial dilakukan sebagai langkah awal dalam pengembangan perekonomian dan pembangunan pusat pertumbuhan (growth pole) untuk pengembangan wilayah secara keseluruhan.

#### **2.4 Pusat Pengembangan Ekonomi**

Higgins (1995) dalam Safrizal (2008) menyatakan bahwa : “the growth poles is a set of economic activities that has capacity to introduce the growth of another set. The poles of development is a set that has the capacity to engender a dialectic of economic and social structure whose effect is to increase the complexity of the whole and to expand its multidimensional return” Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa pusat pertumbuhan merupakan sekumpulan aktivitas ekonomi yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi lainnya secara positif. Sedangkan Pusat pembangunan adalah sekumpulan aktivitas ekonomi yang memiliki kemampuan untuk membangkitkan struktur ekonomi yang mendasar dan dapat mendorong proses pembangunan daerah secara multidimensional. Karena pembangunan disini lebih berorientasi pada kegiatan ekonomi, maka pusat pembangunan dapat diistilahkan pula sebagai pusat pengembangan ekonomi (economic development poles).

Sejalan dengan pengertian diatas, Arsyad (2011:108) mengartikan pengembangan ekonomi daerah sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah bersama masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Suatu investasi pada pusat pengembangan ekonomi akan mempengaruhi pertumbuhan kota pada daerah tersebut dalam bentuk peningkatan investasi, lapangan kerja, pendapatan dan kemajuan teknologi yang kesemuanya merupakan unsur kemakmuran.

Kemakmuran secara umum dapat diketahui dari tingkat pendapatan perkapita, karenanya pusat pengembangan ekonomi ini dapat diidentifikasi dalam bentuk elastisitas kemakmuran ( $W_r$ ) dari daerah dimana pusat tersebut berada. Dalam kaitan dengan hal ini, menurut safrizal (2008.132-133), jika diumpamakan wilayah R terdiri dari pusat perkotaan,  $u$ , dan daerah belakangnya,  $r$ , maka struktur suatu wilayah dapat digambarkan sebagai berikut :

$$R = u + r$$

Dari sini dapat dikatakan bahwa  $u$  akan menjadi pusat pengembangan bilamana elastisitas investasi pada pusat tersebut terhadap kemakmuran adalah positif, atau,

$$\begin{aligned} W_r &= (\Delta W_r / W_r) / (\Delta I_u / I_u) \\ &= (I_u / W_r)(\Delta W_r / I_u) > 0 \end{aligned}$$

Ini berarti bahwa investasi pada pusat pengembangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada wilayah bersangkutan. Bila hasil perhitungan elastisitas pada persamaan diatas ternyata  $>1$ , yang berarti bahwa bilamana investasi sebesar 1% pada pusat tersebut dapat menghasilkan pendapatan lebih besar dari 1%, maka daerah tersebut dapat dikatakan sebagai pusat pengembangan ekonomi yang dominan. Akan tetapi bila elastisitas kemakmuran tersebut bergerak antara 0 sampai 1, maka pusat tersebut dikatakan sebagai pusat pengembangan yang “sub dominant”.

Sejalan dengan hal diatas, klassen (1973) mengatakan bahwa, efisiensi ekonomi nasional akan turun jika sumberdaya capital dalam jumlah yang banyak ditanamkan pada daerah-daerah yang bermasalah, yaitu daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi atau pendapatan perkapita lebih rendah dari tingkat nasional. Setelah membagi daerah dalam 4 klasifikasi, klassen menyarankan pemerintah untuk lebih memprioritaskan investasi pada daerah inti (tipologi 1) yaitu daerah yang memiliki pertumbuhan dan pendapatan perkapita lebih tinggi dari pendapatan nasional (arsyad.2011;148).

### **BAB III. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sedangkan analisis kuantitatif adalah metode analisis yang melakukan perhitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari masalah. Sehingga metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang memamparkan atau menjelaskan data melalui angka-angka.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk seri waktu (time series) yang bersumber dari publikasi BPS dan lembaga terkait lainnya, serta literatur pendukung selama periode tahun 2010–202 di Provinsi Jambi.

#### **3.3 Metode Analisis Data**

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan sebelumnya, maka metode analisis datanya adalah :

1. Yang pertama menggunakan Analisis Tipologi Klassen. Alat analisis tipologi daerah digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi daerah pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerah cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and high income), daerah maju tapi tertekan (high income but low growth), daerah berkembang cepat (high growth but low income) dan daerah relatif tertinggal (low growth and low income) (Sjafrizal, 1997:27-38 dalam Kuncoro, 2004:223).

2. Yang kedua maka digunakan Analisis Location Quotient (LQ). Alat analisis Location Quotient (LQ) membandingkan besarnya peranan sektor di suatu daerah (kabupaten dan kota di Propinsi Jambi) terhadap besarnya peranan sektor tersebut di tingkat daerah di atasnya (Propinsi Jambi). Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki daerah tersebut yaitu sektor basis dan sektor non basis. Rumus LQ dapat ditulis sebagai berikut:

$$LQ = \frac{Vi/Vt}{Yi/Yt}$$

Dimana :

Li = jumlah tenaga kerja sektor i pada tingkat wilayah yang lebih rendah

Lt = total tenaga kerja pada tingkat wilayah yang lebih rendah

Ni = jumlah tenaga kerjan sektor i pada tingkat wilayah yang lebih diatas

Nt = total tenaga kerja pada tingkat wilayah yang lebih diatas

Vi = nilai PDRB sektor i pada tingkat wilayah yang lebih rendah

Vt = total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih rendah

Yi = nilai PDRB sektor i pada tingkat wilayah yang lebih atas

3. Yang ketiga mengenai bagaimana interaksi ekonomi antar daerah maka menggunakan rumus sebagai berikut :

$$I_{12} = a(W_1 P_1)^a (W_2 P_2)^b / J^{a+b}_{12}$$

Keterangan :

I<sub>12</sub> = interaksi dalam wilayah 1 dan 2

W<sub>1</sub> = PDRB perkapita wilayah 1 (rupiah)

W<sub>2</sub> = PDRB perkapita wilayah 2 (rupiah)

P<sub>1</sub> = jumlah penduduk wilayah 1

P<sub>2</sub> = jumlah penduduk wilayah 2

J<sub>12</sub> = jarak antar wilayah 1 dan 2 (meter)

a = konstanta yang nilainya 1

b = konstanta yang nilainya 2



## **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Struktur Perekonomian Kabupaten/Kota di Propinsi Jambi**

Untuk mengetahui struktur perekonomian kabupaten/kota di Propinsi Jambi sejak tahun 2017-2021 maka menggunakan data rata-rata laju PDRB ADHK 2010 dan rata-rata PDRB perkapita selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen. Alat analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Untuk kabupaten/kota yang dilakukan analisis sebanyak 11 kabupaten kota dengan data-data sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010  
Kabupaten /Kota di Propinsi Jambi Tahun 2017- 2021 (%)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	Rerata
Kerinci	5,86%	4,93%	4,23%	3,86%	4,16%	4,61%
Merangin	5,39%	4,93%	4,25%	0,83%	5,09%	4,10%
Sarolangun	4,68%	4,80%	4,26%	-0,25%	6,61%	4,02%
Batang Hari	4,81%	4,83%	5,07%	-0,39%	4,74%	3,81%
Muaro Jambi	4,95%	5,01%	4,79%	0,37%	4,08%	3,84%
Tanjab Timur	3,07%	2,94%	4,21%	-3,92%	0,13%	1,29%
Tanjab Barat	4,48%	6,77%	5,01%	-0,60%	1,36%	3,40%
Tebo	5,58%	4,98%	4,76%	-0,02%	4,32%	3,92%
Bungo	5,68%	4,65%	4,19%	-0,44%	5,12%	3,84%
Kota Jambi	4,68%	5,30%	4,73%	-3,96%	3,94%	2,94%
Sungai Penuh	6,02%	4,88%	5,01%	-0,16%	3,67%	3,88%

Sumber : data diolah

**Tabel 4.2 Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun  
2017-2021 (Ribuan Rupiah)**

Kabupaten/ Kota	Tahun					Rata- Rata
	2017	2018	2019	2020	2021	
Kerinci	24.430	25.525	26.643	26.295	27.169	26.012,40
Merangin	23.676	24.482	25.571	27.898	29.157	26.156,80
Sarolangun	33.796	34.731	36.061	36.984	38.821	36.078,60
Batang Hari	39.833	41.293	43.632	38.862	39.845	40.693,00
Muaro Jambi	34.795	35.599	36.949	40.396	41.414	37.830,60
Tanjabtim	77.260	78.939	83.968	75.275	74.577	78.003,80
Tanjabbar	85.022	89.173	93.524	96.496	96.618	92.166,60
Tebo	26.936	27.812	29.125	30.159	31.090	29.024,40
Bungo	32.009	32.806	34.011	34.610	35.767	33.840,60
Kota Jambi	29.990	31.212	32.862	31.052	31.880	31.399,20
Kota Sungai Penuh	47.053	48.788	52.171	47.774	48.776	48.912,40

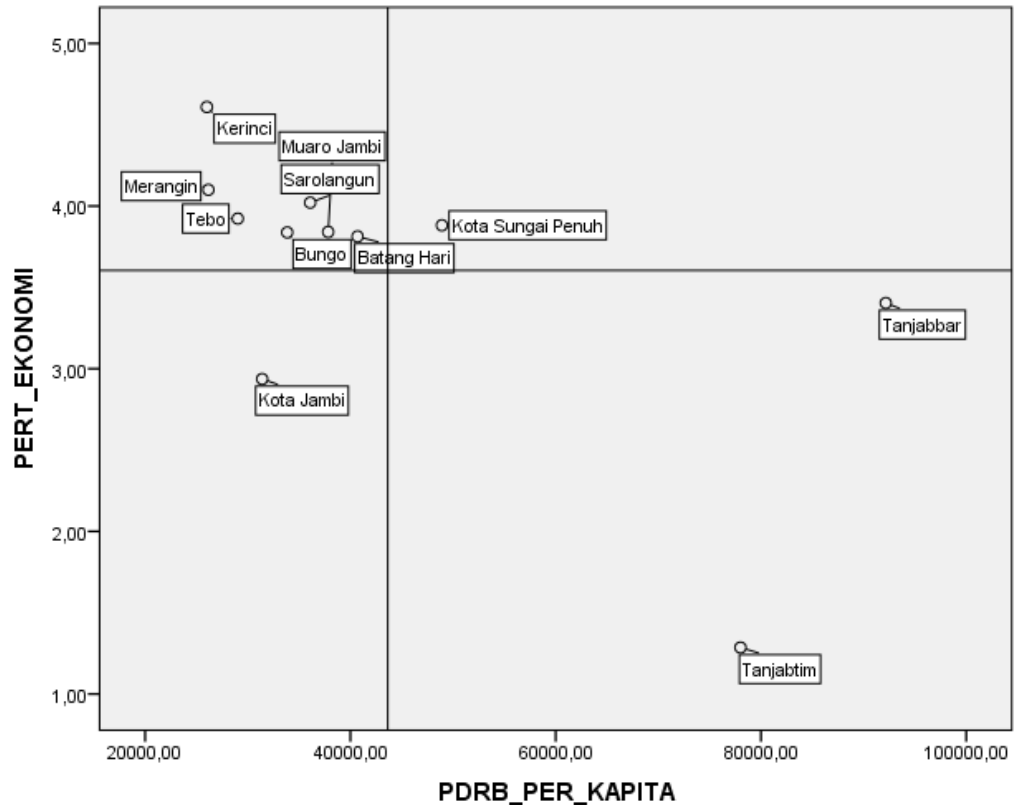
Sumber : Badan Pusat Statistik Jambi 2022

Posisi struktur ekonomi di tiap Kabupaten/Kota di Propinsi Jambi berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan Analisis Tipologi Klassen selama lima tahun (2017-2021) diperoleh posisi struktur perekonomian di setiap kabupaten/kota di Propinsi Jambi sebagai berikut: Kabupaten kerinci memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,61% dan rata-rata PDRB per kapita sebesar Rp 26.012.400, kabupaten Merangin memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,10% dan rata-rata PDRB per kapita sebesar Rp 26.156.800, Kabupaten Sarolangun memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,02% dan rata-rata PDRB per kapita sebesar Rp 36.078.600, Kabupaten Batanghari memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 3,81% dan rata-rata PDRB per kapita sebesar Rp 40.693.000, Kabupaten Muaro Jambi memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 3,84% dan rata-rata PDRB per kapita sebesar Rp 37.830.600, Kabupaten Tanjab Timur memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 1,29% dan rata-rata PDRB per kapita sebesar Rp 78.003.000,

Kabupaten Tanjab Barat memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 3,4% dan rata-rata PDRB per kapita sebesar Rp 92.166.600, Kabupaten Tebo memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 3,92% dan rata-rata PDRB per kapita sebesar Rp 29.024.400, Kabupaten Bungo memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 3,84% dan rata-rata PDRB per kapita sebesar Rp 33.840.400, Kota Jambi memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 2,94% dan rata-rata PDRB per kapita sebesar Rp 31.399.200, dan terakhir Kota sungai penuh memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 3,88% dan rata-rata PDRB per kapita sebesar Rp 48.912.400.

Pola dan struktur perekonomian kabupaten kota di Propinsi Jambi berdasarkan Tipologi Klassen, maka pada daerah yang berada pada kuadran I (kategori daerah cepat maju dan tumbuh atau daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita lebih tinggi) adalah kota sungai penuh. Untuk daerah yang berada pada kuadran II (kategori daerah maju tertekan atau daerah yang memiliki tingkat pendapatan perkapita lebih tinggi namun tingkat pertumbuhan ekonomi lebih rendah) adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk daerah yang masuk dalam kuadran III (kategori daerah berkembang pesat atau daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah) adalah Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi. Yang cukup mengejutkan adalah fakta mengenai Kota Jambi yang masuk daerah kuadran IV (kategori daerah tertinggal atau daerah dengan tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita yang lebih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 1.1.

**Grafik 4.1 Posisi Struktur Perekonomian Kabupaten/Kota Di Propinsi Jambi  
Tahun 2017-2021 Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen**



#### **Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten/Kota Di Propinsi Jambi,**

Teori Location Question, seperti dikemukakan Bendavid (1991), digunakan untuk menganalisis keragaman basis ekonomi. Berdasarkan analisis tersebut dapat diidentifikasi sektor-sektor apasaja yang dapat dikembangkan untuk tujuan sektor dan tujuan menyupplay kebutuhan lokal, sehingga sektor yang dikatakan potensial dapat dijadikan sektor prioritas utama dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Menurut Sjafrizal (2008) Sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keunggulan kompetitif (Competitive Advantage) yang cukup tinggi. Sedangkan sektor non -basis adalah sektor -sektor lainnya yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis atau service industries.

Kriteria pengukuran nilai LQ yang dihasilkan sebagai berikut:

1.  $LQ > 1$  = berarti laju pertumbuhan sub sektor i di daerah studi k adalah lebih besar bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan sub sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi p. Dengan demikian, sub sektor p merupakan sub sektor basis untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi k (Basis)
2.  $LQ < 1$  : berarti laju pertumbuhan sub sektor i di daerah studi k adalah lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan sub sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi i. Dengan demikian, sub sektor i bukan merupakan sektor basis (Non Basis)
4.  $LQ = 1$  : berarti laju pertumbuhan sub sektor i di daerah studi k adalah sama dengan laju pertumbuhan sub sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi p (Tetap)

Adapun asumsi yang digunakan dalam analisis Location Quotient(LQ) adalah sebagai berikut :

1. Penduduk di wilayah bersangkutan memiliki pola permintaan wilayah yang sama dengan pola permintaan nasional.
2. Permintaan wilayah akan suatu barang akan terpenuhi terlebih dahulu oleh produksi wilayah, kekurangannya diimpor dari wilayah lain.

Dari perhitungan LQ, didapatkan sector basis di beberapa kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Sektor yang dikategorikan sebagai sektor basis di sarolangun, yaitu memiliki nilai lebih besar dari 1, yang pertama terdapat sektor kontruksi yang dimana nilai LQ sebesar ( 2,20) yang berpengaruh terhadap PAD dikabupaten sarolangun, yang kedua penyediaan akomodasi dan makan minum yang nilai LQ sebesar (2,17) yang artinya sektor ini merupakan petunjuk sebagai surplus akan pada sektor tersebut sehingga dapat mengekspornya ke daerah lain secara efisien, serta menunjukkan bahwa sektor ini memiliki keunggulan komparatif

untuk sektor ini. Dilanjut dengan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib , yaitu dengan nilai LQ sebesar (2,04).

2. Kabupaten Batanghari memiliki sektor unggulan Industri Pengolahan dengan nilai LQ sebesar 1.05 yang dimana hal ini dipengaruhi oleh kegiatan industri pengolahan karet. Selanjutnya sector Jasa Lainnya dengan nilai LQ sebesar 1.02 yang dimana hal ini didorong oleh kegiatan jasa konsultasi dan pelaksanaan pekerjaan kontruksi di wilayah kabupaten Batanghari. Selanjutnya Kabupaten Batanghari memiliki sektor unggulan Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai LQ sebesar 1.12
3. Kabupaten Muaro Bungo memiliki sektor unggulan pada sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor unggulan pertama karena nilai LQ yang didapat 0,93 mendekati 1. Sektor batubara di Kabupaten Muaro bungo memiliki kualitas yang cukup baik dengan kandungan kalori antara 5.000 sampai dengan 7.300 kalori, penggalian emas juga terdapat di beberapa daerah di Kabupaten Muaro Bungo Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib merupakan sektor unggulan kedua setelah sektor Pertambangan dan Penggalian karena nilai LQ yang didapat 0,88 mendekati 1. Pemerintah Kabupaten Muaro Bungo memiliki kualitas yang cukup baik dalam melayani Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib hal ini dipengaruhi dengan meningkatnya kegiatan peradilan dan administrasi badan pemerintah dilingkungan pemerintah Kabupaten Muaro Bungo, pemerintahnya sudah melakukan banyak kemajuan infrastruktur serta memberikan jaminan sosial yang merata kepada masyarakat. Sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor unggulan ketiga karena nilai LQ yang didapat 0.88 mendekati 1. Kabupaten Muaro Bungo terdapat banyak gudang perusahaan yang bertempat di wilayah tersebut dan menjadi daerah transit mobil yang mengangkut barang.
4. Kabupaten merangin mempunyai beberapa sector yang menjadi sector unggulan yang dimana sector tersebut jika menjadi sector prioritas yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan kabupaten merangin. Dan sector

tersebut antara lain : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan  $LQ = 18,42$ , sector Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan  $LQ = 1,73$  dan sektor Real Estate dengan  $LQ = 1,37$

5. Sector unggulan Kabupaten Kerinci mempunyai beberapa sector yang menjadi sector unggulan yang dimana sector tersebut jika menjadi sector prioritas yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan kabupaten kerinci. Dan sector tersebut antara lain : sector Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan  $LQ = 1,92$ , sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan  $LQ = 2,80$  dan sector Informasi dan Komunikasi dengan  $LQ = 1,92$
6. Kota Jambi memiliki sector basis atau sector unggulan yaitu : sector Industri Pengelolaan karena menunjukkan hasil perhitungan  $LQ$  lebih dari 1. Selanjutnya sector Konstruksi karena menunjukkan hasil perhitungan  $LQ = 1,26$ . Selanjutnya sector Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor karena menunjukkan hasil perhitungan  $LQ$  lebih dari 1

Secara rata-rata terdapat 6 sector yang menjadi sector basis dan 11 sector merupakan sector non basis di Provinsi Jambi. Sektor yang merupakan sector basis adalah sector pertambangan dan penggalian, sector pertanian, kehutanan dan perikanan; sector pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sector administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan social wajib; sector Jasa pendidikan; sector Jasa kesehatan dan kegiatan social sebesar 1,29. Sektor non basis adalah sector industry pengolahan, sektorpengadaan listrik dan gas, sector konstruksi, sector perdagangan besar dan eceran, sector transportasi dan pergudangan, sector penyediaan akomodasi makanan dan minuman, sector informasi dan komunikasi, sector jasa keuangan dan asuransi, sector real estate, sector jasa lainnya dan jasa perusahaan. Sektor non basis dalam perekonomian di provinsi Jambi merupakan sector sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil analisis Gravitasi diperoleh interaksi ekonomi di setiap kabupaten/kota di Propinsi Jambi adalah sebagai berikut : Kota Jambi memiliki total nilai interaksi sebesar 295.207.884.996.315.000 dan memiliki interaksi terkuat dengan Kabupaten Batanghari; Kota Pekalongan memiliki total nilai

interaksi sebesar 78.774.044.199.987.100 dan memiliki interaksi terkuat dengan Kabupaten Batang; Kabupaten Batanghari memiliki total nilai interaksi sebesar 19.635.462.071.036.800 dan memiliki interaksi terkuat dengan Kabupaten Sarolangun; Kabupaten Bungo memiliki total nilai interaksi sebesar 23.588.493.628.643.700 dan memiliki interaksi terkuat dengan Kabupaten Merangin; Kabupaten Merangin memiliki total nilai interaksi sebesar 18.287.005.016.209.000 dan memiliki interaksi terkuat dengan Kabupaten Sarolangun; Tanjab Timur memiliki total nilai interaksi sebesar 43.875.219.101.136.400 dan memiliki interaksi terkuat dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Pola dan struktur perekonomian kabupaten kota di Propinsi Jambi berdasarkan Tipologi Klassen, maka pada daerah yang berada pada kuadran I adalah kota sungai penuh. Untuk daerah yang berada pada kuadran II adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk daerah yang masuk dalam kuadran III adalah Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi. Yang cukup mengejutkan adalah fakta mengenai Kota Jambi yang masuk daerah kuadran IV
2. Secara rata-rata terdapat 6 sektor yang menjadi sector basis dan 11 sektor merupakan sector non basis di Provinsi Jambi. Sektor yang merupakan sector basis adalah sector pertambangan dan penggalan, sector pertanian, kehutanan dan perikanan; sector pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sector administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan social wajib; sector Jasa pendidikan; sector Jasa kesehatan dan kegiatan social. Sektor non basis adalah sector industry pengolahan,



sektor pengadaan listrik dan gas, sector konstruksi, sector perdagangan besar dan eceran, sector transportasi dan pergudangan, sector penyediaan akomodasi makanan dan minuman, sector informasi dan komunikasi, sector jasa keuangan dan asuransi, sector real estate, sector jasa lainnya dan jasa perusahaan. Sektor non basis dalam perekonomian di provinsi Jambi merupakan sektor sekunder dan tersier.

3. Berdasarkan hasil analisis Gravitasi diperoleh interaksi ekonomi di setiap kabupaten/kota di Propinsi Jambi diperoleh hasil bahwa interaksi terkuat antar daerah rata-rata terjadi dengan daerah yang memiliki jarak terdekat dengannya

### **Saran**

1. Perlu dikembangkan regulasi investasi yang saling bersinergi antara Peraturan Daerah, pusat pertumbuhan ekonomi (Kota Jambi) dengan Peraturan Daerah hinterland (Muaro Jambi, Batanghari, Merangin, Sarolangun, Bungo, Tebo. Tanjabtim, Tanjabbar, kerinci dan sungai penuh) agar dapat menarik penanaman modal di Propinsi Jambi.
2. Perlu dikembangkan kerjasama secara intensif dan berkelanjutan dengan kabupaten/kabupaten lain yang tergabung dalam kawasan yang sama. Kerjasama yang saling menguntungkan akan dapat meningkatkan pertumbuhan di Propinsi Jambi dan memacu pada pemerataan distribusi pendapatan

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Apriansyah, Muhammad Adjie, Anna Yulianita, and Imelda Imelda. *Analisis Pusat Pertumbuhan Di Kawasan Seberang Ulu Kota Palembang*. Diss. Sriwijaya University, 2018.
- Emalia, Zulfa, and Isti Farida. "Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Interaksi Spasial Di Provinsi Lampung." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 19.1 (2018): 61-74.

- Fadrullah, M. (2022). *Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Di Kecamatan Pangkaln Kuras Kabupaten Pelalawan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Febrianto, F. H., & Santoso, E. B. (2022). Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Di Wilayah Madiun Raya Untuk Mengurangi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Wilayah. *Jurnal Penataan Ruang*, 17(1), 41-47.
- Iqbal, Muhammad. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Jambi*. Diss. IPB University.
- Jati, D. H. (2016). KAJIAN PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAHDI KABUPATEN BOYOLALI. *Geo Educasia*, 1(5).
- Karmila, K., & Risma, O. R. (2022). Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(3), 1739-1745.
- Nainggolan, Pandapotan. "Analisis penentuan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kabupaten simalungun." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 1.12 (2013): 14770.
- Paramita, P. F. C., Amin, C., & MM, S. S. (2020). *Evaluasi Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Wonogiri* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Pasaribu, E., Priyarsono, D. S., Siregar, H., & Rustiadi, E. (2014). Dampak Spillover Pusat-Pusat Pertumbuhan di Kalimantan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 5(2), 225-238.
- Putra, D. A. W., Rusda, D., & Aziz, A. (2020). Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan (Growth Pole) dan Wilayah Belakang (Hinterland) Provinsi Kalimantan Tengah. *Ecoplan*, 3(2), 105-118.
- Rachmadani, Ananda Putri, Azwardi Azwardi, And Nazeli Adnan. *Pusat Pertumbuhan Dan Potensi Ekonomi Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) Provinsi Sumatera Selatan*. Diss. Sriwijaya University, 2019.
- Rahayu, E. (2014). *Penentuan pusat-pusat pertumbuhan dalam pengembangan wilayah di kabupaten Gunungkidul* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember).
- Rizki, D. A., Rustiadi, E., & Soma, S. (2017). Penentuan Pusat-pusat kegiatan baru sebagai Alternatif untuk mengurangi Kemacetan Kota

Bogor. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*, 1(3), 287-297.

Robingatun, R., Hayati, R., & Indrayati, A. (2014). Daya Saing Wilayah dan Sektor Unggulan Sebagai Penentu Pusat Pertumbuhan Baru Orde II Di Kabupaten Purworejo. *Geo-Image*, 3(1).

Salmah, E., Sahri, S., & Astuti, E. (2020). Analisis Penentuan Pusat Pertumbuhan Baru di Kabupaten Lombok Barat. *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 62-71.

Saputra, J. (2021). Kajian Penetapan Desa Pusat Pertumbuhan Dalam Pengembangan Wilayah Di Kecamatan Pangean Bagian Selatan. *Jurnal Perencanaan, Sains Dan Teknologi (Jupersatek)*, 4(1), 619-624.

Siregar, S. D. S. (2019). Analisis Pengembangan Wilayah Melalui Pusat Pusat Pertumbuhan Baru di Wilayah Pesisir Kabupaten Deli Serdang.

Sugiyono, Agus. "Pengembangan Industri Padat Energi Di DAS Mamberamo Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Timur Indonesia." *Prosiding Teknologi, Ekonomi, Dan Otonomi Daerah, BPPT, Jakarta, Hal* (1999): 2-89.

Umar, M. I. Z. B., Ramly, F., & Matitaputty, I. T. (2021). Analisis Penentuan Daerah Pusat Pertumbuhan/Pelayanan Di Wilayah Kepulauan Maluku. *JURNAL PERTANIAN KEPULAUAN*, 5(2), 1-10.

Wahyuni, Resti Sri, Hamdi Nur, And Lasti Yossi. "Tipologi Kabupaten Di Provinsi Jambi Berdasarkan Kesejahteraan Masyarakat." *Abstract Of Undergraduate Research, Faculty Of Civil And Planning Engineering, Bung Hatta University* 1.1 (2018).

## BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

## Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp)
1	Transportasi	250.000,-
2	Pembelian bahan habis pakai	400.000,-
3	Konsumsi	250.000,-
4	Penerbitan Jurnal	600.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>1.500.000,-</b>

## Jadwal Penelitian

[illegible]